

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MIE BASAH
MENGANDUNG BORAKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs)**

Oleh :

GRISSA ALLIA TAJANOVA

NIM : E1A019008

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang merupakan pembeli mie basah yang mengandung bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa boraks dalam putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs, diketahui bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dengan dijatuhkannya sanksi pidana kepada Alan Gemilang Bin M. Hasan selaku pelaku usaha mie basah mengandung boraks berdasarkan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Mie Basah, Boraks.*

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF WET NOODLES CONTAIN
BORAX BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER
PROTECTION**

(Study of Decision Number 98/Pid.B/2022/PN Lgs)

By :

GRISSA ALLIA TAJANOVA

NIM : E1A019008

ABSTRACT

The research was conducted with the aim of analyze the legal protection for consumers who are buyers of wet noodles which contain ingredients that are prohibited from being used as food additives in the form of borax in the Decision of the Langsa District Court Number 98/Pid.B/2022/PN Lgs based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The approach method that used in this research is normative juridical approach with statutory approach method, descriptive analytical research specifications. The data sources used is secondary data such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out by means of a literature study, the data obtained are presented in narrative text, and the data analysis method used is a qualitative normative method.

Based on the results of research on the Decision of the Langsa District Court Number 98/Pid.B/2022/PN Lgs, it is known that consumers have obtained legal protection to protect consumer rights contained in Article 4 letter a and letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This form of legal protection can be seen by the imposition of criminal sanctions for Alan Gemilang Bin M. Hasan who is a wet noodles contain borax business actor based on Article 136 letter b jo. Article 75 paragraph 1 letter b of Law Number 18 of 2012 concerning Food.

Keywords : *Legal Protection, Consumers, Wet Noodles, Borax.*